

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan hal naluriah dalam interaksi antar-manusia, sebab alam pikiran manusia memiliki perbedaan dalam mempersepsi, menginterpretasi, dan cara menyampaikan makna mengenai dunia. Menurut Hener (2010, hlm. 137) komunikasi dan konflik berada dalam hubungan yang saling memengaruhi; komunikasi dapat melahirkan konflik, dapat memperluas konflik, dan juga dapat mencegah konflik, membantu dalam manajemen dan resolusi konflik. Papper (dalam Samovar, dkk., 2013, hlm. 382) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan karakter konflik yang dominan, karena berfungsi sebagai alat penyebar konflik dan sumber dari manajemen konflik.

Sejarah penelitian konflik dengan pendekatan ilmu komunikasi bermula pada tahun 1974. Seorang peneliti komunikasi bernama Browsers membahas prakarsa-prakarsa anggota *Speech Communication Association (SCA)* untuk mendongkrak minat para ilmuwan muda terhadap salah satu bidang yang terabaikan: peran komunikasi dalam konflik (Sillars, 2014, hlm. 389). Hal itu dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap ilmuwan terdahulu yang menyatakan bahwa interaksi seseorang semata-mata rasional dan strategis, sehingga komunikasi hanya diasumsikan sebagai kegiatan biner (berkomunikasi atau tidak), dan konflik dinyatakan selalu merugikan (*destructive*). Dua asumsi memungkinkan proses dan fungsi komunikasi dalam sebuah konflik: pertama, konflik sebagai hasil dari ketidak-cukupan atau ketidak-efektifan komunikasi dan kerjasama yang tidak baik disebabkan superioritas yang tinggi (Littlejohn dan Foss, 2009, hlm. 164). Ide Browsers pada tahun 1974 itu hingga kini membuat peran ilmu komunikasi dalam pencegahan dan resolusi konflik semakin meningkat baik dalam ranah kajian akademis, maupun praktis.

Lima puluh tahun lalu, Krauss dan Deutsch (1966; 2016, hlm. 174) melakukan penelitian dengan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dalam percobaan

tawar-menawar (*lobbying*). Proses tawar-menawar yang mereka hadapi merupakan masalah yang relatif sederhana untuk dipecahkan. Namun, membiarkan peserta menggunakan cara mereka berkomunikasi dapat menghalangi kemajuan satu sama lain dan dapat menambah rumit masalah, dan biasanya membuahkan hasil yang lebih buruk bagi keduanya. Cara mereka berkomunikasi dapat mengubah fokus peserta dari bersama-sama memecahkan masalah tawar-menawar itu menjadi ke pencarian strategi di mana peserta dapat saling mengalahkan satu sama lain.

Hasil penelitian Krauss dan Deutsch (2016) tersebut menunjukkan kenaiifan bahwa komunikasi dapat berfungsi sebagai pelarut konflik, pelarut yang fungsinya untuk memperbaiki masalah. Namun, penelitian mereka lebih realistis menunjukkan bahwa komunikasi sebagai instrumen netral, alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan ancaman atau tawaran resolusi konflik, untuk mengajukan penawaran yang tidak masuk akal atau mengemukakan penawaran yang dapat diterima, untuk mengobarkan ketegangan konflik atau untuk menjinakkan konflik antara pihak yang terlibat.

Alan S. Sillars, professor dari University of Montana, Amerika Serikat, telah fokus meneliti bagaimana komunikasi sangat berperan dalam konflik interpersonal. Sillars menyusun kepustakaan dan melakukan berbagai penelitian berkaitan dengan peran komunikasi dalam konflik interpersonal. Menurutnya, definisi standar mengenai konflik tampaknya merupakan sebuah titik awal yang tepat mengkaji komunikasi, sepanjang ketidakcocokan tujuan yang dirasakan dipandang dengan sangat luwes; artinya, orang tidak sepenuhnya menyadari tujuannya, tujuan muncul dan berubah seiring dengan berlangsungnya interaksi, dan tujuan di masa lalu barangkali akan sangat berbeda dengan tujuan di masa mendatang (Caughlin dan Vangelisti, 2006; Sillars, 2014, hal. 392).

Tujuan yang sering dikonsepsikan sebagai sumber konflik, diterima dan disampaikan melalui sebuah pesan dalam proses komunikasi. Dalam konflik, orang tidak sekadar memilih tipe pesan yang satu dan tipe pesan lainnya, tetapi sebaliknya,

membuat kombinasi pesan sambil berinteraksi. Dalam hal ini, sebagian besar yang telah dipelajari adalah struktur urutan (tindak-ke-tindak) konflik dalam episode-episode individual—bagaimana satu tindakan menimbulkan respons khas. Tendensi yang dominan ialah merespons dengan cara yang sama; contoh, ketika seseorang berbicara dengan gaya menghindar atau konfrontatif, semakin besar kemungkinan penutur berikutnya bersifat serupa (Sillars dan Wilmot, 1994; Sillars, 2014, hal. 397). Konsep mengenai tujuan yang terus berkembang dalam sebuah interaksi, dan bagaimana pesan dalam komunikasi konflik interpersonal menunjukkan peranan yang penting bagi penelitian komunikasi dan konflik.

Penelitian Thomas dan Pondy pada tahun 1977, memberikan ilustrasi sederhana bagaimana komunikasi menjadi alat untuk mengelola konflik. Studi itu meminta para pejabat eksekutif sebuah lembaga federal mengingat sebuah konflik yang pernah mereka alami dan menceritakan cara mereka mengatasinya. Hasilnya mereka mengatribusikan mode-mode konflik yang paling kooperatif dengan dirinya sendiri dan mengatribusikan mode-mode kompetisi pihak lawan. Mereka juga menyeleksi frasa-frasa deskriptif yang mengesankan adanya rasionalitas dalam tindak komunikasi yang mereka lakukan (*misalnya, menjelaskan, memberi nasihat, memberi saran*) dan menggunakan bahasa yang mengisyaratkan adanya subjektivitas dalam menyebut komunikasi yang dilakukan pihak lawan (*misalnya, menuntut, menolak, memerintah*) (Sillars, 2013, hal. 394).

Komunikasi tidak hanya berperan dalam konflik interpersonal, tetapi juga dalam konflik antar kelompok. Ellis dan Maoz (2003) mengembangkan suatu persepektif komunikasi dalam karya mereka tentang pola-pola komunikasi dan argumen di antara Israel-Yahudi dan Palestina. Dalam perspektif tersebut, konflik, menurut definisinya, bersifat interaktif dan merupakan akibat orang-orang saling tergantung yang merasakan tujuan-tujuan saling tidak akur. Kesalingtergantungan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Semua perilaku dalam situasi interaktif mengandung nilai pesan sehingga komunikatif. Hubungan komunikatif adalah bingkai yang mendefinisikan bagaimana perasaan para pihak kepada sesamanya

(misalnya, sebagai teman atau lawan; dominan atau subordinat; ramah atau bermusuhan) dan mendefinisikan isi bingkai. Ada gerak atau pesan tertentu yang dianggap patut atau tidak patut dikarenakan bentuk hubungan tersebut. (Ellis, 2014, hlm. 434).

Isu-isu komunikasi utama dalam kontak antarkelompok yang dimaksudkan untuk mengelola konflik ialah (a) membangun persekutuan atau kesediaan untuk menghadapi masalah (b) melibatkan diri atau kesediaan untuk mengemukakan gagasan dan kebiasaan dirinya sendiri ke dalam pertemuan melalui kemauan untuk bekerja, berbagi, dan mencari tahu (c) refleksi diri-kritis, yang mengharuskan kajian atas gagasan-gagasan dirinya sendiri; serta (d) menghargai perbedaan-perbedaan pada orang lain, termasuk mendengarkan riwayat personal dan sudut pandang mereka (Ellis, 2014, hlm. 433).

Komunikasi dalam sebuah konflik, tidak tunggal, tetapi turut dilatarbelakangi oleh budaya. Budaya, gender, umur, kelas sosial, dan lingkungan yang memengaruhi ketidak efektifan komunikasi (Mayer, 2000, hlm. 10). Norma-norma budaya dari sebuah kelompok itu tergantung konteks, tetapi yang lebih penting, norma-norma kelompok dibuat, direproduksi, dipelihara, dan diubah lewat komunikasi. Citra kongitif kolektif yang menggambarkan kelompok, mengandalkan komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mengatur persepsi (Ellis, 2014, hlm. 435). Bahkan, cara kita menamai, membingkai, menyalahkan, dan berusaha untuk menyelesaikan konflik sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Mengingat kehadirannya, budaya lebih dari topik yang terkait dengan konflik dan penyelesaian konflik. Konflik merupakan bagian integral dari semua interaksi, harmonis, dan konfliktual kehidupan manusia (LeBaron dan Pillay, 2006, hlm. 16).

Menurut Ting-Tomey (dalam Priandono, 2013, hlm. 266), konflik antar budaya memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) konflik melibatkan persepsi budaya, persepsi kita dilihat dari lensa etnosentrisme dan stereotip budaya sendiri 2) konflik melibatkan interaksi di mana konflik terjadi dan dikelola melalui perilaku verbal dan

nonverbal yang terkait pada nilai budaya 3) konflik melibatkan saling ketergantungan antar pihak yang sedang berkonflik 4) konflik melibatkan tujuan kepentingan bersama dan kepentingan diri 5) konflik melibatkan aspek melindungi citra antar kelompok di mana dalam situasi konflik, pihak terlibat cemas melindungi citra masing-masing individu dan kelompok. Dengan beberapa penjelasan tersebut, gaya komunikasi sebuah masyarakat adat dalam manajemen konflik akan berbeda dengan kelompok dengan latar belakang yang berbeda pula.

Latar belakang budaya dalam konflik di Indonesia masih menjadi faktor pemicu utama. Berdasarkan data tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS), Indonesia memiliki sejumlah 633 kelompok suku besar¹, belum termasuk sub-sukunya. Jumlah suku yang besar itu dapat menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mengelola konflik. Catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebutkan bahwa 75 persen dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural². Catatan PBB itu senada dengan pendapat LeBaron dan Pillay (2006, hlm. 13) bahwa konflik tidak dapat didefinisikan tanpa melihat hubungannya dengan konteks budaya, sejak pemahaman konflik bersifat luas. Karenanya, kajian komunikasi lintas budaya dan resolusi konflik di negara yang majemuk seperti Indonesia merupakan hal penting.

Data dan argumen itu senada dengan pemikir kebudayaan Alexander Uhi, yang mengungkapkan betapa pentingnya kajian komunikasi di Indonesia demi mencapai suatu perdamaian dalam kenegaraan. Menurut Uhi (2016, 186-187), masyarakat Indonesia yang kompleks menyimpan potensi konflik yang lebih besar daripada masyarakat yang homogen, sehingga harus memiliki ruang gerak untuk dapat mengembangkan mekanisme yang menjamin adanya keharmonisan. Proses belajar dalam komunikasi sangat dibutuhkan, jika ingin menuju suatu keutuhan dalam hidup berbangsa. Diperlukan tindakan strategis dan komunikatif, yang tampak melalui

¹ <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> (diakses 11/09/2016 15:37:40)

² <http://m.tempo.co/read/news/2015/05/21/078668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia> (diakses 11/09/2016 15:26:42)

proses sosial, demi terciptanya suatu masyarakat yang demokratis. Penekanan komunikasi begitu penting, mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia, dengan kompleksitas permasalahan keanekaragamannya, sangat memerlukan ruang gerak bagi masyarakat untuk mengembangkan perilaku yang komunikatif.

Sayangnya, Indonesia sendiri belum bisa menjadi negara yang mencerminkan kemajemukan yang terkelola dengan sempurna. Masih terjadi persinggungan antar suku dengan berbagai latar belakang penyebab yang berbeda-beda. Menurut Trijono, dkk. dalam bukunya “Potret Retak Nusantara” (2004, hlm. 1) terdapat dua jenis konflik internal di Indonesia hari ini; konflik penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan konflik komunal antar warga sipil beda etnis dan agama. Yang pertama kita temukan dalam kasus Aceh, Papua. Yang kedua kita temukan dalam kasus Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, Poso, dan sebagainya. Keduanya baik konflik penentuan nasib sendiri maupun “perang komunal” menandai konflik kronis (*the hotspots*) di Indonesia.

Beberapa konflik besar yang ditimbulkan latar-belakang etnik pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2001, di Sampit Kalimantan Tengah terdapat konflik antara Suku Dayak dan Madura. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat empat anggota keluarga Madura, Matayo, Haris, Kama dan istrinya, tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Massa meminta agar Timil menyerahkan pelaku pembunuhan itu. Karena permintaan mereka tidak dituruti, massa marah dan membakar rumah. Insiden malam itu dapat dihentikan polisi. Sayang, pembakaran terus meluas ke rumah-rumah lainnya³. Akibat bentrok dua suku ini ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu⁴. Data dari rumah sakit menunjukkan bahwa 13.000 orang telah

³ <http://m.tempo.co/read/news/2015/05/21/078668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia> (diakses 11/09/2016 15:26:42)

⁴ <http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/lima-konflik-sara-paling-mengerikan-ini-pernah-terjadi-di-indonesia> (11/09/2016 14:58:05)

direlokasi dari hutan ke tempat penampungan di Pos Polisi. Konflik meluas, Dayak mengatakan tidak akan menghentikan serangannya sebelum menghabisi seluruh migran di wilayah Kalimantan yang berjumlah 60.000 jiwa⁵.

Insiden besar berlatar belakang budaya lainnya ialah konflik Poso-Ambon. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan empat bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai empat tahun⁶. Konflik ini berawal dari masalah sepele, saat bulan puasa Ramadhan, seorang warga keturunan yang sedang mabuk membacok seorang warga berbeda agama di masjid. Polisi telat mengantisipasi masalah tersebut, kerusuhan pun berbuntut panjang. Apalagi menjelang berlangsungnya Pilkada Poso, terjadi saling provokasi dengan membuat selebaran yang menghasut. Kedua provokator dan pemimpin penyerangan akhirnya memang mati terbunuh⁷.

Di luar narasi besar konflik di Indonesia, terdapat konflik-konflik lain antar suku etnik, baik dengan kelompoknya sendiri atau pun dengan pihak luar. Misalkan di Aceh, masyarakat adat sering berkonflik terkait lingkungannya dengan pihak perusahaan atau bahkan pemerintah Indonesia melalui aparat militer atau instansi pemerintahannya. Setelah 2005, perlawanan rakyat berbagai *gampong* terhadap perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan di Aceh telah meningkatkan konflik. Berdasarkan data HuMA, pada tahun 2013, tercatat 10 konflik sumberdaya alam di Aceh (Ramli, 2015, hlm. 52). Atau di Jambi, Suku Anak Dalam telah lama berkonflik dengan perusahaan-perusahaan Sawit. Tanah Melayu pun sering menjadi tempat pertarungan yang menumpahkan darah, antara warga Indonesia. Misalkan kekerasan

⁵ (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1191865.stm> diakses 11/09/2016 15:09:13)

⁶ <http://m.tempo.co/read/news/2015/05/21/078668047/konflik-yang-dipicu-keberagaman-budaya-indonesia> (diakses 11/09/2016 15:26:42)

⁷ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo> (diakses 11/09/2016 15:32:20)

yang dialami oleh Kelompok SAD Sungai Beruang, yang tinggal di wilayah selatan area HGU, dari penggusuran hingga penembakan. Alasan perusahaan, karena terjadi pencurian besar maupun penjualan buah sawit—baik buah segar atau tandan— milik PT Asiatic. Produsen kelapa sawit itu pun mendatangkan jajaran Brimob pada Agustus 2011⁸.

Berbagai konflik yang terjadi memang resiko kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Susan (2016, hlm. xviii), Indonesia merupakan *vulnerable society* (masyarakat rentan) yang disebabkan oleh tiga ciri mendasar, yaitu (1) tingginya tingkat segregasi sosial berbasis pada identitas keagamaan, etnis, dan golongan; (2) identitas kolektif menjadi mekanisme mobilisasi kekerasan; (3) kelembagaan kelola konflik adat yang telah mengalami pelemahan akibat modernisasi politik. Dalam penelitian ini, poin ketiga yang dikemukakan oleh Susan menjadi topik utama. Bagaimana sebuah lembaga adat tetap mampu menerapkan sistem politik tradisionalnya dalam resolusi konflik. Sistem politik itu, digali dalam penelitian ini dengan pendekatan komunikasi yang terjalin yang didasarkan nilai-nilai tradisi dan budaya tradisi masyarakat adat.

Holzinger, 2009 (dalam Priandono, 2014, hlm. 268) mengemukakan tiga fungsi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Pertama, komunikasi memberikan informasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan objek konflik dan informasi tentang nilai-nilai, tujuan, kepentingan, keyakinan, dan emosi dari pihak yang bersengketa. Kedua, komunikasi mengambil peran dalam proses negosiasi seperti tuntutan, tawaran, ancaman, dan konsesi memberikan tandan kesediaan para pihak bersengketa untuk menyetujui kompromi. Ketiga, komunikasi dapat mengambil fungsi dalam hal berdebat. Perdebatan argumenasi untuk meyakinkan pihak-pihak lain dalam klaim validitas seseorang dan untuk mencapai sebuah konsensus.

⁸ <http://koran.bisnis.com/read/20130403/252/6367/konflik-agraria-yang-tersingkir-dari-jambi-konflik-terpanjang-bagian-4-habis> (diakses 11/09/2016 15:20:56)

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik. Studi ini mengambil habitus masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar, Kampung Sukamulya Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Lebih khusus, penelitian ini diselenggarakan di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Berdasarkan catatan terakhir yang ada pada pamakayaan (dukun tani) disebutkan bahwa jumlah warga kasepuhan yang termasuk dalam jiwa jero sebanyak 15.795 jiwa terhimpun dalam 3.833 KK. Sementara warga kasepuhan yang berada di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar sebanyak 338 jiwa terhimpun dalam 76 KK. Warganya terdiri dari warga jiwa jero dan warga jiwa luar. Warga jiwa jero adalah warga kasepuhan yang memiliki pertalian darah dengan Abah Anom meskipun pertaliannya sudah sangat jauh dan sangat rumit untuk ditelusuri. Warga jiwa jero ini bertempat tinggal di Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar dan kampung-kampung lainnya dengan tetap mengikuti semua tradisi kasepuhan secara penuh, terutama dalam bidang pertanian.

Berdasarkan data hasil wawancara (dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2016, 15.30-17.00 di Cilimus, Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung) dengan Teh Yeti, warga Ciptagelar yang pernah mengabdikan untuk Abah Anom, selama delapan tahun hidup di sana, dan hingga saat ini masih sering mengabdikan ke kasepuhan juga Mamah Ageung, ia belum pernah mengalami konflik sosial yang cukup besar, begitupun dari cerita-cerita yang dituturkan oleh para *sesepuh* (tetua) adat di sana. Meskipun demikian, ia menuturkan, ada saja masalah-masalah kecil antar-warga yang disebabkan hubungan personal, atau terkait dengan pekerjaan, misalkan terkait pengelolaan uang dari wisatawan, atau konflik hubungan antara pria dan wanita di sana. Selain itu, konflik lahan wilayah konservasi dengan pihak Perhutani selama ini tidak memancing konflik masyarakat yang besar, mampu diselesaikan dengan musyawarah antara pimpinan adat dan pimpinan Perhutani. Konflik kecil itu tidak pernah sampai menjadi huru-hara, bahkan pertengkaran fisik pun tidak pernah terjadi.

Data lain ditunjukkan saat peneliti melakukan diskusi dengan Mamah Ageung (dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Desember 2016, di Cilimus, Kel. Isola, Kec.

Sukasari, Kota Bandung) yang menggambarkan bahwa sebenarnya, dalam sejarah di masa lalu, kasepuhan pernah pecah menjadi tiga kasepuhan. Konfliknya adalah disebabkan unsur ketidak-terimaan dalam ketetapan pemilihan sesepuh girang. Akan tetapi, menurut Mamah Ageung konflik itu tidak menjadi konflik yang besar hingga saat ini, masing-masing Kasepuhan memiliki pengikutnya, dan sistem pemerintahan berlangsung di Kasepuhan masing-masing tanpa harus saling memengaruhi. Konflik-konflik yang dikemukakan oleh Teh Yeti dan Mamah Ageung menjadi penting untuk diteliti untuk digali bagaimana komunikasi berperan dalam sumber-sumber konflik tersebut.

Selain itu, kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar itu menjadi penting untuk diteliti, bagaimana sebuah masyarakat adat mampu mengelola kehidupannya hingga terhindar dari konflik yang besar. Padahal, hingga tahun 2016, desa Ciptagelar telah berusia 648 tahun jika dilihat dari pesta Serah Tahun yang telah diselenggarakan oleh mereka. Usia kasepuhan yang sangat tua dan tradisi-tradisi yang masih terjaga pun akan menciptakan model komunikasi khas masyarakat adat dalam resolusi konflik.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, digunakan perspektif kualitatif dengan metodologi etnografi komunikasi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana orang-orang mempersepsi dunia dengan menelaah bagaimana mereka berkomunikasi, terutama dalam manajemen konflik yang dipengaruhi faktor komunikasi lintas budaya. Teknik utama dalam etnografi ialah pengamatan berperan serta (*participant observation*) dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam atau studi dokumen. Karena itu etnografi sering dikaitkan dengan hidup secara intim dan untuk waktu yang lama dengan suatu komunitas pribumi yang diteliti yang bahasanya dikuasai oleh peneliti (Mulyana, 2013, hlm. 157-162).

Untuk panduan membedah resolusi konflik dalam budaya masyarakat adat Ciptagelar, digunakan pendekatan sumber konflik dari Bernard Mayer. Menurut Bernard Mayer (2000, hlm. 9), sumber konflik terdiri dari permasalahan kebutuhan,

nilai, struktur, komunikasi, emosi, dan sejarah. Masing-masing dari variabel itu digali dengan teori-teori untuk membedahnya. Sumber konflik tersebut akan dijadikan panduan dalam meneliti bagaimana komunikasi masyarakat adat Ciptagelar dalam resolusi konflik.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang diuraikan di latar belakang, masalah yang menjadi fokus utama penelitian adalah “Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik?”

Untuk menjawab rumusan permasalahan utama itu, peneliti pun menyusun rumusan masalah mikro, atau identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik nilai?
2. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik kebutuhan dasar?
3. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik komunikasi?
4. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik emosi?
5. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik struktur?
6. Bagaimana model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik sejarah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik. Tujuan ini perlu dicapai dalam penelitian untuk melengkapi teori komunikasi dalam model komunikasi masyarakat adat dalam resolusi konflik yang akan berbeda dengan model komunikasi dalam resolusi konflik di luar masyarakat adat.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat/Signifikansi Teoritis

Berdasarkan penelusuran pustaka *online* ke beberapa jurnal Perguruan Tinggi di Indonesia, hasilnya sejauh ini peneliti komunikasi di Indonesia kurang memerhatikan penelitian mengenai ilmu komunikasi dalam perannya terhadap resolusi konflik di dalam masyarakat, terutama yang menggali bagaimana nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam resolusi konflik. Penelitian mengenai resolusi konflik lebih banyak dalam lingkup komunikasi dalam korporasi. Bahkan, penelitian konflik di dalam korporasi multinasional lebih banyak lagi ditemukan dalam jurnal-jurnal internasional. Padahal, berdasarkan keberagaman suku di Indonesia, peneliti dapat menggali banyak kearifan lokal sebagai wahana pengetahuan dalam resolusi konflik.

Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai kajian teori Ilmu Komunikasi di Indonesia, khususnya bidang Komunikasi Lintas Budaya mengenai budaya dan resolusi konflik dengan pendekatan sumber konflik dari Bernard Mayer dan resolusi konflik dari LeBaron dan Pillay. Penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan yang lain, politik dan keamanan nasional, antropologi, sosiologi, pemberdayaan masyarakat dan bidang ilmu lainnya yang memerlukan referensi penelitian terkait konflik.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi teori tersendiri yang didasarkan pada kearifan lokal budaya Indonesia (khususnya budaya Sunda) dalam memaknai dan mengelola konflik dalam mencapai komunikasi tanpa konflik dan dunia yang damai.

1.2.2 Manfaat/Signifikansi Kebijakan

Konflik bagi siapapun merupakan hal yang mesti diselesaikan dengan sebuah kebijakan. Kebijakan dalam resolusi konflik akan tepat jika pengambil kebijakan dapat mengetahui banyak referensi mengenai bagaimana suatu kelompok masyarakat memaknai sumber konflik dan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan

dalam organisasi (baik pemerintah, non-pemerintah, kelompok masyarakat) untuk memandang bagaimana anggotanya memaknai konflik, juga bagaimana seharusnya anggotanya dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

1.2.3 Manfaat/Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak masyarakat adat Ciptagelar dalam mempertahankan dan memperbaiki pola resolusi konflik yang sesuai dengan kebudayaannya. Juga bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan masyarakat adat Ciptagelar diharapkan memahami bagaimana kebudayaan dan komunikasi masyarakat adat Ciptagelar agar terhindar dari konflik.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Aksi Sosial

Dalam lingkup Ilmu Komunikasi, diharapkan penelitian ini memberikan pencerahan bagi peneliti untuk mulai lebih mendalami terkait peranan ilmu komunikasi dalam resolusi konflik, terutama dalam masyarakat adat. Apalagi Indonesia merupakan negara yang majemuk. Selain itu, semoga menjadi pemantik tambahan bagi peneliti muda untuk mulai menggali bagaimana komunikasi lintas budaya di Indonesia.

Dalam wacana globalisasi, penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjalankan komunikasi yang dapat memaknai dan mengelola konflik dengan caranya tersendiri demi mencapai kedamaian. Kesadaran itu diharapkan mampu menjadikan titik terang bagi arah hidup masyarakat Indonesia yang mulai saling sikut-menyikut dalam persaingan kehidupan ekonomi-politik. Dengan kesadaran itu pula diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan sikap masyarakat Indonesia dalam menghargai kearifan lokal, baik secara nilai maupun secara artefak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi yang secara garis besar menggambarkan mengapa penelitian ini dilaksanakan dan tujuan

apa yang ingin dicapai. Bab ini terdiri dari berbagai sub-bab, yaitu: (1) Latar Belakang yang membahas mengenai mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan apa yang menjadi alasan peneliti mengangkat masalah tersebut; (2) Rumusan Masalah yang membahas mengenai fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan utama penelitian dan berfungsi untuk membatasi permasalahan penelitian; (3) Tujuan Penelitian yang membahas mengenai capaian penelitian yang diharapkan dalam menjawab permasalahan di latar belakang dan di pertanyaan rumusan masalah; (4) Manfaat Penelitian yang diharapkan didapatkan dari penelitian yang dilaksanakan; serta (4) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II. Kajian Pustaka. Bab ini berisikan dari rujukan-rujukan teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian.

Bab III. Metode Penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai dalam menyediakan pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

Bab IV. Temuan dan Pembahasan. Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V. Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.